

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI SYARIAH BERBASIS ENTERPRISE RESOURCE PLANNING PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH**Ali Topan Lubis¹⁾, Rukiah NST²⁾**^{1,2}FEBI / Podi Perbankan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

E-mail: alylubis18@gmail.com, nasutionrukiah8@gmail.com

Abstract

The research looks into how to create a clear plan for using the Sharia Accounting System (SAS) together with Enterprise Resource Planning (ERP) in Sharia Microfinance Institutions (LKMS) in Indonesia. The goal is to improve long-term performance and make sure the system follows Sharia principles. The study uses a detailed review of existing literature from Islamic accounting, computerized accounting systems, and how ERP systems are used in small businesses. The results show that ERP systems have a lot of potential to help with connecting different processes and providing up-to-date information, which is important for following Sharia rules. But for ERP to work well, it needs to fit well with the tasks it handles (Task Technology Fit) and have strong support from management. The ERP system should be built specifically to meet Sharia accounting standards, including how to report Zakat and Waqf, and should support the main goals of Sharia, like fairness and justice. This study provides a useful guide that connects the need for Sharia compliance with the complexity of ERP systems, helping LKMS and system developers focus on features that support Sharia audits, Zakat/Waqf reporting, and proper internal controls for better long-term performance.

Keywords: Enterprise Resource Planning (ERP), Akuntansi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Maqashid Sharia, Kinerja Berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Urgensi Penelitian
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bagian penting dalam membangun ekonomi inklusif di Indonesia. LKMS memiliki dua fungsi, yaitu sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana dan sebagai lembaga yang menjalankan nilai-nilai spiritual dan sosial (Masyita, 2017). Fungsi tersebut diwujudkan melalui prinsip Maqashid Sharia, yang mengharuskan LKMS tidak hanya mementingkan keuntungan (falah) tetapi juga memberikan kontribusi sosial melalui zakat atau waqf, serta memastikan keadilan dalam setiap transaksi (muamalah). Oleh karena itu, sistem Akuntansi Syariah (SAS) yang digunakan harus mampu memenuhi standar pelaporan keuangan konvensional (seperti SAK ETAP atau PSAK 101-110) sekaligus menyampaikan informasi sosial dan memastikan setiap transaksi tetap sesuai

dengan prinsip syariah (Pasha & Sugianto, 2024).

Banyak LKMS, khususnya yang berskala kecil, masih menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang terpisah-pisah atau berbasis spreadsheet (Iswanaji, 2019). Kondisi ini berisiko mengganggu kepatuhan terhadap prinsip Syariah, seperti kesulitan membedakan dana komersial dan sosial, serta kurangnya kemampuan dalam memenuhi rukun dan syarat dalam akad seperti qabdh pada transaksi Murabahah. Selain itu, hal ini juga menyebabkan ketidakefisienan dalam operasional, seperti adanya duplikasi data, kesulitan dalam melakukan pencocokan data, dan penundaan dalam proses pelaporan.. Dalam era industri 4.0, semakin dibutuhkan penggabungan sistem secara menyeluruh. Enterprise Resource Planning (ERP) adalah solusi teknologi informasi yang menggabungkan berbagai fungsi bisnis seperti akuntansi, logistik, operasional, dan SDM ke

dalam satu database yang terpusat (Shehab et al., 2004). Proses penggabungan ini memberikan transparansi data secara real-time dan otomatisasi yang bisa mengurangi kesalahan manual serta meningkatkan efisiensi secara signifikan (Praharaj & Chhatoi, 2025).

1.2. Permasalahan dan Kesenjangan

Meskipun ERP memiliki potensi yang besar, masih ada kesenjangan signifikan yang perlu diatasi dalam konteks LKMS. Kesenjangan Kontekstual Adopsi: Implementasi ERP yang sukses biasanya membutuhkan sumber daya yang besar, yang bertentangan dengan keterbatasan yang biasa ditemui di LKMS (Zheng & Khalid, 2022). Bagaimana LKMS bisa menerapkan ERP secara efektif tanpa mengorbankan fungsi utama dalam memenuhi kepatuhan Syariah?

Kesenjangan Konfigurasi Syariah: Sistem ERP konvensional dibuat berdasarkan standar akuntansi biasa dan proses bisnis yang tidak berorientasi Syariah.

Hal ini menyebabkan masalah ketika mencoba mengintegrasikan kebutuhan khusus dari akuntansi Syariah, seperti pelaporan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta pencatatan transaksi berbasis bagi hasil (mudharabah, musharakah) dan berbasis jual beli (murabahah, salam) yang memerlukan perlakuan akuntansi yang berbeda (Saadah, 2022). Selain itu, penerapan kontrol internal yang preventif terhadap kepatuhan Syariah di tingkat aplikasi juga sulit diimplementasikan (Saadah, 2022).

Kesenjangan Konseptual Task Technology Fit (TTF): Model TTF (Moeryanto, 2024) yang mengukur sejauh mana teknologi sesuai dengan tugas yang dilakukan pengguna menjadi sangat rumit dalam konteks LKMS, karena "tugas" tidak hanya mencakup efisiensi (kecepatan) tetapi juga kepatuhan Syariah (keabsahan transaksi).

1.3. Tujuan Penelitian

Meskipun potensi ERP sangat besar, masih ada kesenjangan yang signifikan yang perlu diatasi dalam konteks LKMS. Kesenjangan Kontekstual Penerapan: Implementasi ERP

yang berjalan baik biasanya membutuhkan banyak sumber daya, yang bertentangan dengan keterbatasan yang biasa ditemui di LKMS (Zheng & Khalid, 2022). Bagaimana LKMS bisa menerapkan ERP secara efektif tanpa mengorbankan fungsi penting dalam penerapan prinsip Syariah?

Kesenjangan Konfigurasi Syariah: Sistem ERP tradisional dirancang berdasarkan standar akuntansi biasa. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis kebutuhan fungsional Akuntansi Syariah, termasuk pelaporan ZISWAF dan kontrol Muamalah, dalam kerangka struktur ERP.
- 2) Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penerapan ERP di LKMS, terutama yang berkaitan dengan Pengelolaan Syariah dan keterbatasan sumber daya.
- 3) Merancang kerangka konseptual yang fleksibel untuk konfigurasi ERP yang sesuai dengan prinsip Akuntansi Syariah dan Tujuan Syariah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Kinerja Berkelanjutan LKMS.

1.4. Tinjauan Pustaka Singkat

Akuntansi Syariah tidak hanya digunakan untuk melaporkan keuangan, tetapi juga untuk menjamin keadilan sosial. Maqashid Sharia (Hassan et al., 2022) memberikan kerangka penilaian yang lebih luas, mencakup perlindungan keyakinan, jiwa, akal, keluarga, dan harta benda. Dalam akuntansi, hal ini berarti adanya laporan ganda, yaitu (1) laporan keuangan, dan (2) laporan sosial/kepatuhan, misalnya seperti pelaporan dana Qardh dan ZISWAF. Standar akuntansi seperti AAOIFI dan PSAK 101-110 menetapkan persyaratan ini, yang harus dipenuhi oleh sistem ERP.

ERP secara alami memerlukan perubahan proses bisnis (BPR), yang mendorong organisasi untuk menyesuaikan proses internalnya sesuai dengan standar terbaik yang terkandung dalam sistem tersebut (Shehab et al., 2004).

Penerapan ERP secara tepat dapat meningkatkan transparansi informasi dan mengurangi risiko ketidakseimbangan informasi, yang merupakan syarat penting dalam memastikan keadilan dalam transaksi Syariah.

Model TTF (Moeryanto, 2024; Zheng & Khalid, 2022) menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan teknologi tergantung

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Sintesis Literatur Kualitatif. Metode ini dipilih karena tujuannya adalah untuk membuat kerangka kerja konseptual baru yang menggabungkan beberapa bidang pengetahuan, yaitu ERP, Akuntansi Syariah, dan Adopsi Teknologi di Lembaga Keuangan Mikro. Penelitian ini tidak mengumpulkan data langsung dari lapangan.

2.1. Sumber Data dan Kriteria Seleksi Literatur

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari publikasi ilmiah. Berikut adalah domain dan sumber data yang

digunakan:

1. Domain Akuntansi Syariah & Regulasi: Jurnal, standar akuntansi Syariah (seperti PSAK Syariah dan AAOIFI), serta literatur mengenai Maqashid Sharia dan Sharia Governance.

2. Domain Teknologi Informasi: Jurnal tentang ERP, BPR, Kontrol Internal dalam sistem informasi, serta model adopsi teknologi seperti TTF dan DOI.

3. Domain Keuangan Mikro: Literatur mengenai LKMS, UKM, dan tantangan dalam penerapan sistem informasi di lembaga mikro atau kecil. Kriteria pemilihan literatur adalah sebagai berikut: (1) artikel harus berkaitan dengan ERP, (2) membahas aspek Akuntansi Syariah atau keuangan Islam, (3) relevan dengan konteks UKM atau Lembaga Keuangan Mikro, dan (4) diterbitkan dalam jurnal bereputasi atau prosiding ilmiah yang terindeks.

2.2. Prosedur Analisis Data

pada seberapa sesuai kemampuan sistem dengan tugas yang diperlukan pengguna. Dalam LKMS, "tugas" melibatkan dimensi kepatuhan yang spesifik. Dukungan dari manajemen tertinggi, terutama dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), dinilai sebagai faktor penting untuk mengatasi hambatan dan memastikan proses perubahan itu sah dan diterim

Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap yang teratur:

- 1) Ekstraksi dan Klasifikasi Data: Mencari serta menarik informasi penting dari setiap sumber literatur, lalu mengelompokkannya berdasarkan tiga tema utama yaitu: (a) Kebutuhan Kepatuhan Syariah, (b) Persyaratan Fungsional ERP, dan (c) Faktor Kritis dalam Adopsi.
- 2) Analisis Komparatif dan Identifikasi Kesenjangan: Membandingkan informasi yang ditemukan dari berbagai tema. Contohnya, membandingkan kebutuhan kontrol internal standar ERP (seperti yang dijelaskan oleh Chang et al., 2014) dengan kebutuhan kontrol internal yang sesuai dengan Syariah. Tahap ini bertujuan untuk menemukan perbedaan atau celah yang perlu diselesaikan melalui kerangka kerja yang akan dibuat.
- 3) Sintesis Tematik dan Pengembangan Kerangka Kerja: Menggabungkan semua temuan ke dalam satu model konseptual yang utuh. Hasil sintesis ini fokus pada pengembangan Komponen Konfigurasi ERP Syariah (seperti spesifikasi Audit Trail Syariah) serta Faktor Keberhasilan Adaptif (seperti peran Departemen Pelayanan Syariah dalam BPR).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Analisis Kebutuhan Fungsional Akuntansi Syariah dalam Konteks ERP

Hasil dari peninjauan literatur menunjukkan bahwa Akuntansi Syariah membutuhkan pengaturan khusus dalam modul ERP standar.

3.1.1. Integrasi Logistik-Akuntansi untuk Transaksi Berbasis Jual Beli (*Murabahah*)

Transaksi jual beli seperti Murabahah merupakan bagian penting dari LKMS, tetapi juga merupakan titik dengan risiko kepatuhan yang tinggi. Untuk transaksi Murabahah sah, LKMS harus memiliki dan menguasai barang sebelum menjualnya kembali kepada nasabah.

- 1) Kebutuhan Fungsional: ERP harus memastikan integrasi secara real-time antara Modul Logistik (manajemen aset) dan Modul Akuntansi (pembelian dan penjualan).
- 2) Mekanisme Kontrol Aplikasi Syariah: Sistem harus diatur agar tidak memungkinkan pencatatan piutang Murabahah di Modul Keuangan sebelum ada entry yang mengonfirmasi penerimaan barang di Modul Logistik. Kontrol ini mencegah kesalahan secara otomatis dan menerapkan prinsip Fiqih Muamalah di tingkat aplikasi (Saadah, 2022).

3.1.2. Pemisahan Buku Besar dan Pelaporan Dana ZISWAF

LKMS mengelola dana komersial (laba) dan dana sosial (ZISWAF). PSAK Syariah meminta agar dana sosial dipisahkan dan dilaporkan secara transparan, seperti yang dikatakan oleh Hamdan et al. (2013).

- a) Kebutuhan Fungsional: ERP membutuhkan konfigurasi Buku Besar Paralel atau Modul Keuangan Adaptif yang dapat memisahkan chart of accounts serta saldo dana komersial dan dana ZISWAF (termasuk Wakaf Uang) secara jelas dan ketat.

- b) Implikasi Pelaporan: Modul ini harus bisa menghasilkan Laporan Keuangan ZISWAF yang mandiri, yaitu Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZISWAF, selain Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komersial.

Ini penting untuk mengukur Kinerja Sosial dan kepatuhan terhadap Maqashid Sharia, menurut Tamanni & Haji Besar (2019).

3.1.3. *Shariah Audit Trail* dan Kontrol Pengendalian Internal

Audit Syariah memerlukan jejak audit yang lebih rinci daripada audit finansial konvensional, termasuk persetujuan DPS.

- a) Kebutuhan Fungsional: ERP harus menyediakan *Shariah Audit Trail* yang merekam tidak hanya siapa yang melakukan *entry* data, tetapi juga di titik mana *workflow* membutuhkan validasi dari DPS atau petugas kepatuhan Syariah, dan merekam persetujuan tersebut dalam sistem.
- b) Kontrol Proses: Proses bisnis (BPR) harus dipaksa melalui tahapan yang mengandung *gate* Syariah. Misalnya, *workflow* pembiayaan harus mencakup tahap "Verifikasi Syarat Akad oleh Petugas Syariah" sebelum status transaksi berubah menjadi "Aktif." Kontrol ini memastikan Kepatuhan Proses (Basri & Siti-Nabiha, 2016).

3.2. Pembahasan: Sintesis Konseptual dan Implikasi Teoretis

3.2.1. Sinkronisasi BPR dan *Fiqih Muamalah*: Dari Efisiensi ke Kepatuhan

ERP secara tradisional mendukung BPR dengan tujuan mengurangi biaya dan meningkatkan kecepatan operasional. Namun, dalam konteks LKMS, BPR yang diinisiasi oleh ERP harus berubah menjadi perubahan yang didorong oleh kepatuhan.

Implikasi Teoretis: Teori BPR (Shehab et al., 2004) perlu dimodifikasi.

Dalam LKMS, standar proses bisnis bukan hanya praktik terbaik di industri, tetapi juga ketentuan Fiqih Muamalah. ERP menjadi alat untuk menerapkan disiplin Syariah dalam kegiatan sehari-hari. Jika BPR Syariah tidak dilakukan sebelum menyesuaikan sistem, maka akan terjadi GIGO (Garbage In, Garbage Out) dari perspektif Syariah, sehingga menghasilkan data keuangan yang tidak sah, meskipun secara teknis efisien.

3.2.2. Faktor Kritis Adopsi di LKMS: Dukungan Ganda dan TTF Adaptif

Adopsi ERP di LKMS sangat dipengaruhi oleh dimensi yang unik.

A. Kebutuhan Dukungan Ganda (Dual Support)

Faktor penting dalam kesuksesan ERP adalah dukungan dari manajemen tingkat atas (Jackson, 2020).

Di LKMS, dukungan ini perlu diperluas menjadi dukungan ganda yaitu dari Manajemen Eksekutif yang bertugas mengalokasikan sumber daya dan menentukan prioritas, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan legitimasi dan memastikan kepatuhan. Tanpa persetujuan DPS, sistem bisa ditolak oleh pengguna karena dianggap bertentangan dengan prinsip Syariah.

B. *Task Technology Fit* (TTF) Model TTF Adaptif (Moeryanto, 2024) perlu diubah agar mencakup aspek kepatuhan. Dalam hal kualitas tugas, penilaian tidak hanya melihat kecepatan dan jumlah, tetapi juga kecocokan dengan syariah serta kemampuannya dalam membantu pelaporan tujuan syariah (Wanke et al., 2022). Teknologi dianggap efektif hanya jika bisa secara otomatis menerapkan kontrol syariah, sehingga kepatuhan syariah menjadi hasil alami dari sistem, bukan tindakan tambahan yang harus dilakukan secara manual.

3.2.3. Kerangka Kerja Konseptual Penerapan ERP Syariah pada LKM

Kerangka kerja konseptual yang diajukan menggabungkan hasil temuan untuk memandu proses penerapan:

Tahap I: Pra-Penerapan (Fokus pada Kebersihan dan Kesiapan Organisasi)

- Bank Perkreditan Rakyat Syariah: Membawa para pejabat dan manajer untuk merespons ulang seluruh proses bisnis utama (pembiayaan, pendanaan, ZISWAF) agar 100% sesuai dengan prinsip Muamalah.
- Penilaian Keterampilan Ganda: Menentukan kebutuhan pelatihan dalam bidang teknologi informasi dan ilmu Fiqih Muamalah bagi tim penerapan dan pengguna akhir.

Tahap II: Pengaturan dan Penyesuaian (Fokus pada Sistem)a) Pengaturan Modul Keuangan:

Pemisahan Buku Besar: Menyusun Buku Besar ZISWAF secara terpisah dan dukung dengan prosedur otorisasi yang berbeda. Pengelolaan Akuntansi Kontrak: Mengatur sistem untuk menghitung bagian hasil (nisbah) secara otomatis berdasarkan kontrak bagi hasil, bukan hanya bunga tetap, serta memperhatikan perlakuan akuntansi yang sesuai (misalnya, perbedaan antara Murabahah dan Ijarah).

b) Penerapan Kontrol Aplikasi Syariah Preventif: Mengintegrasikan sistem pemeriksaan kepatuhan (seperti yang dijelaskan pada bagian 3.1.1) ke dalam kode ERP untuk mencegah terjadinya transaksi yang tidak sah.

c) Pengembangan Jejak Audit Syariah: Menjamin setiap entri data penting terdokumentasi dengan jejak audit yang mencakup indikator persetujuan DPS atau keabsahan Syariah.

Tahap III: Pasca-Penerapan (Fokus pada Keberlanjutan Kinerja) Integrasi Data: ERP menghasilkan data tunggal yang jelas dan real-time.

Tingkatkan Kinerja: Terwujud dalam dua aspek yaitu 1) Kinerja Ekonomi (efisiensi operasional, keuntungan), dan 2) Kinerja Sosial/Kepatuhan (menjaga terpenuhinya Maqashid Shariah, laporan ZISWAF yang transparan).

Kerangka kerja ini memastikan bahwa ERP bukan hanya sebagai alat efisiensi, tetapi juga sebagai alat pengelolaan Syariah yang terintegrasi (Alkhan & Hassan, 2021).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menyusun kerangka kerja konseptual yang menjadi panduan dalam menerapkan Sistem Akuntansi Syariah menggunakan ERP di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Kerangka kerja ini berlandaskan pada prinsip bahwa penerapan ERP di LKMS harus dianggap sebagai proyek yang

menjunjung tinggi kepatuhan, dengan menempatkan kebutuhan hukum fiqh muamalah sebagai prioritas utama dibandingkan efisiensi operasional semata. Ringkasan Kebaruan (Novelty):

1. Penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan dukungan dual (manajemen dan DPS) sebagai faktor penting dalam proses adopsi di LKMS, sehingga memperluas konsep dukungan manajemen yang biasanya digunakan.

2. Penelitian mengusulkan konsep TTF Adaptif Syariah yang menjadikan kepatuhan sebagai bagian utama dari kualitas tugas.

3. Penelitian juga menyusun spesifikasi teknis untuk pengontrolan aplikasi syariah yang preventif serta audit trail syariah, sehingga memastikan kontrol internal berbasis syariah berjalan otomatis di tingkat sistem.

4. Penelitian menggabungkan modul ERP menjadi modul keuangan adaptif yang harus memiliki kemampuan Buku Besar Paralel ZISWAF untuk melaksanakan akuntabilitas sosial. Dengan mengikuti kerangka kerja ini, LKMS dapat memanfaatkan kekuatan integrasi dan transparansi dari ERP untuk mencapai kinerja berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai Maqashid Syariah.

Saran Praktis:

1. LKMS harus menyiapkan sumber daya yang memadai untuk BPR Syariah pada tahap awal proyek, dan menjadikannya syarat sebelum memilih atau mengkonfigurasi perangkat lunak ERP.
2. Pengembang sistem harus menempatkan fungsi-fungsi yang mendukung pemerintahan syariah (seperti audit trail dan kontrol preventif) lebih tinggi dibandingkan dengan fitur laporan standar.

Saran Penelitian Lebih Lanjut:

1. Diperlukan studi kasus empiris untuk memvalidasi keefektifan serta tantangan dalam penerapan model BPR Syariah dalam implementasi ERP di LKMS skala kecil.
2. Pengembangan riset lanjutan dapat berfokus pada pembuatan prototype atau

skema basis data khusus untuk mengintegrasikan Modul ZISWAF ke dalam struktur ERP open-source.

REFERENSI

- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Does Islamic microfinance serve maqāsid al-shari'a?. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 42(2).
- Alshater, M. M., Hassan, M. K., Sarea, A., & Samhan, H. M. (2022). Islamic accounting research between 1982 and 2020: a hybrid review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Basri, H., & Siti-Nabiha, A. K. (2016). Accounting system and accountability practices in an Islamic setting: A grounded theory perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(1).
- Boldin, S. V., Satushev, A. I., & Sheronov, N. A. (t.t.). The role of enterprise resource planning systems in business process reengineering using industrial enterprises as an example. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 639-647.
- Bosilj-Vukšić, V., & Spremić, M. (2005). ERP System Implementation and Business Process Change: Case study of a pharmaceutical company. *Journal of Information and Organization Technology*, 2005(1), 19-35.
- Chang, S. I., Yen, D. C., Chang, I. C., & Jan, D. (2014). Internal control framework for a compliant ERP system. *International Journal of Accounting Information Systems*, 15(2).

Hamdan, N. O. R. M. A., Mohd Ramli, A., Jalil, A., & Haris, A. S. M. A. D. D. Y. (2013). Accounting for Waqf institutions: a review on the adaptation of fund accounting in developing the Shariah compliant financial reports for mosque. *Procedia Economics and Finance*, 7, 223-228.

Iswanaji, C. (2019). Analysis of accounting information system using hot fit model method in Indonesia Islamic micro financial institutions. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 8(6), 1-10.

Jackson, J. T. (2020). Requirements Enterprise Information System Professionals Need to Implement Enterprise Resource Planning. *Journal of Computer Information Systems*, 60(5).

Júnior, C. H. (2019). Understanding the Determinants of Evaluation, Adoption and Routinisation of Erp Technology (Enterprise Resource Planning) in the Context of Agricultural Farms. *International Journal of Enterprise Information Systems (IJEIS)*, 15(2).

Masyita, D. (2017). Islamic microfinance institutions in Indonesia and the challenges in the supply chain perspectives. *International Journal of Business and Management*, 12(7).

Moeryanto, P. W. (2024). Computerized accounting information system, maqashid sharia and sustainable performance in Indonesia Islamic microfinance: an application of task technology fit/Provita Wijayanti. *Islamic Accounting Review*, 4(1).

Pasha, A. E., & Sugianto, S. (2024). The urgency of implementing sharia accounting in sharia financial

institutions in the Indonesian context: Bibliometric analysis. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2).

Praharaj, A., & Chhatoi, B. P. (2025). Enterprise resource planning (ERP) in business: a contextual snapshot. *Int. J. Inf. Technol. Bus. Manage*, 23(1).

Rahayu, N. I., Hakim, F., Perdana, R., & Arief, R. F. (2025). Analisis Keefektivitasan Penerapan Enterprise Resources Planning berbasis System Application Product dalam Pengendalian Logistik Bank. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*.

Saadah, N. (2022). Implementation of Accounting Standards as an effort to realize the Accountability of Sharia Microfinance Institutions. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(1).

Shehab, E. M., Sharp, M. W., Supramaniam, L., & Spedding, T. A. (2004). Enterprise resource planning: An integrative review. *Business process management journal*, 10(4).

Tamanni, L., & Haji Besar, M. H. A. (2019). Profitability vs Poverty alleviation: has banking logic influences Islamic microfinance institutions?. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2).

Wanke, P., Hassan, M. K., Azad, M. A. K., Rahman, M. A., & Akther, N. (2022). Application of a distributed verification in Islamic microfinance institutions: a sustainable model. *Financial Innovation*, 8(1).

Zheng, J., & Khalid, H. (2022). The adoption of enterprise resource planning and business intelligence systems in small and medium enterprises: A conceptual framework.



Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>

Jurnal Akuntansi dan Pajak, 26(02), 2025, 8-17

*International Journal of Enterprise
Information Systems (IJEIS), 18(4).*